

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Atmasasmita Romli. *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM. RI. (Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2002).
- Chazawi Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001).
- Hiariej O.S. Eddy. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Hiariej O.S. Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Husaini Adian. *Jihad Osama Versus Amerika*. (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001).
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Masyhar Ali, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).
- Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. (Jakarta: Epistema Institute dan HuMA, 2011).
- Mulyadi Lilik. *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*
- Nasution S. *Metode Penelitian Naturalistik*. (Bandung: PT Tarsito, 1968).
- Rahardjo Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia Cetakan I*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Salam Moch. Faisal. *Motivasi Tindakan Terorisme*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005).
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soemitro Hanitjo Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Sofian Ahmad. *Ajaran Kausalitas dalam RKUHP*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016).

Sudarto. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1982-1984).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cetakan kelima, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2015).

Universal Declaration of Human Rights 1948

International Covenant on Civil and Political Rights with Optional Protocol.

International Covenant on Economic and Social Rights.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang saat ini dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Nomor: DTTOT/P-5/405/III/RES.6.1./2018

Financial Action Task Force IX Special Recommendations. October 2001.

C. Artikel

Christianto Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana”. *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011.

Firmansyah Hery. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”. *Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 2, Juni 2011.

Firmansyah Hery. Penelitian di Universitas Tarumanagara Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: “Pergeseran Sasaran Terorisme”. 2017.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Tahun 2012.

D. Internet

<http://international.sindonews.com/read/1238488/42/16-tahun-serangan-911-dihantam-pesawat-orang-orang-berjatuhan-dari-wtc-1505114576>

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/126861/2002-tragedi-bom-bali-1/2017-10-12>

<http://global.liputan6.com/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>

<http://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003>

<https://news.detik.com/berita/d-1167203/data-ledakan-bom-di-indonesia-2000-2009>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160428070552-120-127122/dokumen-rahasia-ungkap-nilai-gaji-tentara-isis>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/13414671/bnpt-sejak-2014-kasus-pendanaan-terorisme-terkait-isis-meningkat>

[http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_indonesia_t
eror_jakarta](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_indonesia_terror_jakarta)

<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40035376>

[http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/13414671/bnpt-sejak-2014-
kasus-pendanaan-terorisme-terkait-isis-meningkat](http://nasional.kompas.com/read/2017/09/27/13414671/bnpt-sejak-2014-kasus-pendanaan-terorisme-terkait-isis-meningkat)

[http://news.liputan6.com/read/2671013/ini-kelompok-teroris-paling-
diwaspadai-di-indonesia-saat-ini](http://news.liputan6.com/read/2671013/ini-kelompok-teroris-paling-diwaspadai-di-indonesia-saat-ini)

<http://elearning.ppatk.go.id/>